

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke-5 Bulan September 2021 (tanggal 24 s.d. 30 September)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

WACANA PENUNJUKKAN PERWIRA TINGGI TNI-POLRI SEBAGAI GUBERNUR/KEPALA DAERAH

Aulia Fitri
Peneliti Pertama/Studi Pertahanan
aulia.fitri@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pemerintah mengutarakan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri pada jabatan kepala daerah/gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Menjelang habisnya masa jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2033, terdapat 271 daerah yang akan mengalami kekosongan kepemimpinan, mengingat Pilkada Serentak baru akan dilaksanakan pada 2024.

Wacana ini menuai kritik keras di kalangan publik, dimana hal ini dinilai dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, yang merupakan kemunduran dalam reformasi TNI yang telah berlangsung lebih dari dua dekade terakhir. Sebelumnya, kasus anggota TNI/Polri aktif menjadi penjabat gubernur juga pernah terjadi, yaitu dalam penunjukkan Komjen M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jabar pada tahun 2018.

SUMBER

Tempo, 27 September 2021; Kompas, 27 September 2021; Detik News, 28 September 2021; CNN Indonesia, 29 September 2021.